

SEBUAH MAHAKARYA BERNAMA INDONESIA SAFETY DRIVING CENTRE

Indonesia akan memiliki empat pusat studi atau kajian tentang keselamatan berkendara yang dinamai Indonesia Safety Driving Centre (ISDC). Proyek ini merupakan mahakarya jajaran Ditlantas Babinkam Polri, yang salah satu tujuannya adalah upaya membangun budaya tertib lalu lintas melalui pembentukan karakter pengendara. Empat pusat studi tersebut akan dipusatkan di empat titik yaitu di Polda Riau, Pusdiklantas, Polda Sulsel dan Akpol.

Mengenai rencana besar jajaran Ditlantas Babinkam Polri tersebut dibenarkan oleh Dirlantas Babinkam Polri Brigjen Pol Drs Djoko Susilo, Msi. "Rencana ini segera kami wujudkan dan kita mulai dari Polda Riau," kata Brigjen Djoko Susilo.

Lalu, apa sebenarnya ISDC itu? IDC adalah tempat belajar dan berlatih, pengujian tentang keselamatan berkendara (Safety Driving/Riding) yang mencakup aspek manusia, kendaraan dan lingkungan. Merupakan wujud dari kepekaan dan kepedulian para pemangku kepentingan dalam mewujudkan dan memelihara Kamseltibcarlantas.

"ISDC juga merupakan strategi untuk membantu pemerintah dalam menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan dan meningkatkan kualitas keselamatan juga sebagai upaya menyiapkan dan meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan para pengendara kendaraan bermotor," ungkap Dirlantas.

Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Chrisnanda DL menambahkan bahwa memang saat ini Polda Riau sedang sibuk mempersiapkan RSDC (Riau Safety Driving Center). "RSDC merupakan pusat latihan atau belajar safety driving maupun safety riding (keselamatan berkendara) yang ada di Pekanbaru," jelas Chrisnanda.

INDONESIA SAFETY DRIVING CENTRE (ISDC)

INDONESIA SAFETY DRIVING CENTRE (ISDC) MERUPAKAN :

1. TEMPAT BELAJAR DAN BERLATIH, PENGUJIAN TENTANG KESELAMATAN BERKENDARA (SAFETY DRIVING/ RIDING) YG MENCAKUP ASPEK MANUSIA, KENDARAAN DAN LINGKUNGAN
2. WUJUD DARI KEPEKAAN DAN KEPEDULIAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA KAMSELTIBCAR LANTAS
3. STRATEGI UNTUK MEMBANTU PEMERINTAH DALAM MENURUNKAN TINGKAT FATALITAS KORBAN KECELAKAAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS KESELAMATAN JUGA SEBAGAI UPAYA MENYIAPKAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN PARA PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA (DLM BERLALU LINTAS)
4. UPAYA MEMBANGUN BUDAYA TERTIB LALU LINTAS MELALUI PEMBENTUKAN KARAKTER PARA PENGENDARA DALAM BERLALU LINTAS
5. PUSAT STUDI/ KAJIAN TENTANG KESELAMATAN BERKENDARA (SAFETY DRIVING/ RIDING)

VISI DAN MISI

VISI

1. MENJADI PELOPOR BAGI KESELAMATAN BERKENDARA DI INDONESIA
2. MENJADI PUSAT STUDI DAN LATIHAN
3. MENJADI PENDUKUNG / TIM TRANSFORMASI

MISI

1. MENYIAPKAN FASILITAS BELAJAR DAN BERLATIH
2. MENYIAPKAN KURIKULUM DAN MATERI-MATERI TENTANG SAFETY DRIVING/ RIDING
3. MENYIAPKAN PELATIH-PELATIH/ INSTRUKTUR YG BERDASARKAN KOMPETENSI
4. MENYIAPKAN KAJIAN-KAJIAN/ STUDI
5. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG SAFETY DRIVING/ RIDING YG BERKOMPETENSI
6. KEMITRAAN
7. MEMBACK UP/ MEMBANTU KEWILAYAHAN/ DAERAH KAITANNYA DENGAN SAFETY DRIVING/ RIDING
8. MELAKSANAKAN KAMPANYE KESELAMATAN



Tempat Tinggal (Flat) PAMEN-KOMBES, PAMEN AKBP KOMPOL, PAMA, BAVPNS



PERSPEKTIF 2



PERSPEKTIF 3



PERSPEKTIF 4

FASILITAS ISDC

I. IAN PUBLIK

II. EDUKASI

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



PENDARTARAN



CEK KESEHATAN



RUANG PUBLIK



1. TEORI (KELAS)



2. AUDIO VISUAL



CAFE/ TEMPAT SOUVENIR



TOILET



TEMPAT MAMPANGS



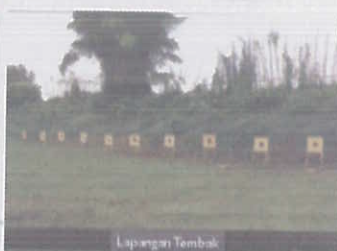
3. SIMULATOR R2



4. SIMULATOR R4



Lapangan Tenis



Lapangan Tembak



Gedung Alass



Kelas Simulator Mengemudi

PEMBERLAKUAN PP 50 TAHUN 2010

MESKIPUN TARIF NAIK SAMSAT TETAP RAMAI

SABTU (26/6/2010) tarif baru untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mulai diberlakukan serentak di Satuan Administrasi Satu Atap (Samsat) di Indonesia. Tak ada gejala berupa reaksi ataupun menurunnya jumlah masyarakat yang mendatangi Kantor Samsat untuk mengurus surat-surat kendaraannya. Meski demikian, petugas tetap melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk di depan pintu masuk Samsat agar diketahui oleh masyarakat secara lebih luas. Seperti terlihat di Samsat Banjarmasin, Samsat Surabaya dan Jambi.

25 Mei lalu. Selain itu, juga berdasarkan surat Telegram Kapolri No ST/1928/VI/2010 tentang Pemberitahuan Berlakunya Tarif PNBP Baru.

Di Samsat Polda Kalsel, seperti dikatakan Kopol Ino Harianto, Kasi STNK, pihaknya sudah mensosialisasikan tarif baru tersebut kepada masyarakat yang mendatangi kantor Samsat jauh hari sebelumnya, termasuk pada hari H-nya. "Mulai hari ini (26/6), kita melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk di depan pintu masuk sehingga masyarakat bisa mengetahuinya. Kebijakan ini diberlakukan serentak se Indonesia," kata Ino.

Menurut Ino, kenaikan tarif pembuatan dan perpanjangan STNK tidak berpengaruh pada jumlah orang yang berurusan di Samsat. "Pelayanan tetap berjalan normal, tingkat kunjungan juga seperti biasa, yakni ratusan orang tiap hari meminta pelayanan registrasi kendaraan bermotor," ujarnya. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sama seperti layanan pembuatan Surat ijin Mengemudi (SIM).

"Baru saja kami lakukan rapat bersama, yaitu membicarakan persiapan peningkatan pelayanan.

"Biaya penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan, Mutasi dan BPKB hari ini resmi naik," jelas Dir Lantas Polda Jambi AKBP Drs Giri Purwanto. Giri Purwanto mengatakan kenaikan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 50/2010 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF LAMA	TARIF BARU
I PENERBITAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)			
A. PENERBITAN SIM A			
1. BARU	PER PENERBITAN	Rp. 75.000,00	Rp. 120.000,00
2. PERPANJANGAN	PER PENERBITAN	Rp. 60.000,00	Rp. 80.000,00
B. PENERBITAN SIM B I			
1. BARU	PER PENERBITAN	Rp. 75.000,00	Rp. 120.000,00
2. PERPANJANGAN	PER PENERBITAN	Rp. 60.000,00	Rp. 80.000,00
C. PENERBITAN SIM B II			
1. BARU	PER PENERBITAN	Rp. 75.000,00	Rp. 120.000,00
2. PERPANJANGAN	PER PENERBITAN	Rp. 60.000,00	Rp. 80.000,00
D. PENERBITAN SIM C			
1. BARU	PER PENERBITAN	Rp. 75.000,00	Rp. 100.000,00
2. PERPANJANGAN	PER PENERBITAN	Rp. 60.000,00	Rp. 75.000,00
E. PENERBITAN SIM D (KHUSUS PENYANDANG cacat)			
1. BARU	PER PENERBITAN	-	Rp. 50.000,00
2. PERPANJANGAN	PER PENERBITAN	-	Rp. 30.000,00
F. PEMBUATAN SIM INTERNASIONAL			
1. BARU	PER PENERBITAN	-	Rp. 250.000,00
2. PERPANJANGAN	PER PENERBITAN	-	Rp. 225.000,00
II PELAYANAN UJIAN KETERAMPILAN MENGEMUDI SIMULATOR	PER UJIAN	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00

DIREKTORAT LALU LINTAS POLRI

16

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF LAMA	TARIF BARU
III PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK)			
A. KENDARAAN BERMOTOR RODA 2, RODA 3, ATAU ANGKUTAN UMUM	PER PENERBITAN	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00
B. KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 ATAU LEBIH	PER PENERBITAN	Rp. 50.000,00	Rp. 75.000,00
C. PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK)	PER PENERBITAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00
IV PENERBITAN SURAT TANDA COBA KENDARAAN (STCK)	PER PENERBITAN/ PER KENDARAAN	Rp. 17.500,00	Rp. 25.000,00
V PENERBITAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (TNKB)			
A. KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 ATAU RODA 3	PER PASANG	Rp. 15.000,00	Rp. 30.000,00
B. KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 ATAU LEBIH	PER PASANG	Rp. 20.000,00	Rp. 50.000,00
VI PENERBITAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)			
A. KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 ATAU RODA 3			
1. BARU	PER PENERBITAN	Rp. 70.000,00	Rp. 80.000,00
2. GANTI KEPEMILIKAN	PER PENERBITAN	-	Rp. 80.000,00
A. KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 ATAU LEBIH			
1. BARU	PER PENERBITAN	Rp. 80.000,00	Rp. 100.000,00
2. GANTI KEPEMILIKAN	PER PENERBITAN	-	Rp. 100.000,00
VII PENERBITAN SURAT MUTASI KENDARAAN LUAR DAERAH	PER PENERBITAN	-	Rp. 75.000,00

DIREKTORAT LALU LINTAS POLRI

17

DEMI PENINGKATAN PELAYANAN

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Zainuri Lubis, Jumat (25/6), kenaikan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri sesuai PP 50 Tahun 2010 dimaksudkan untuk ganti biaya materil dan meningkatkan pelayanan Polri pada masyarakat. Teknisnya adalah dana tersebut dikumpulkan oleh petugas polisi di lapangan kemudian setelah terkumpul disetorkan ke kas negara. Dari sana (kan negara) dikeluarkan lagi dan diberikan ke Polri untuk pengadaan. "Jadi memang tujuannya untuk peningkatan pelayanan," tegas Zainuri Lubis.

Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Direktur II Direktorat Lalu Lintas Polri Kombes Didik Purnomo bahwa peningkatan pelayanan ini akan mulai terlihat pada SIM. Mulai tahun 2010 sejak kenaikan ini diberlakukan SIM akan dilengkapi dengan sebuah microchip yang berisi identitas pemilik seperti sidik jari sementara ke depannya lagi, secara berproses SIM bisa digunakan sebagai alat bayar denda tilang. "PNBP yang disetor ke kas negara, sekitar 90,4% kembali ke Polrim" jelas Didik.

[JT 02]

Contohnya peningkatan layanan Samsat Drive Thru, layanan pengantaran STNK rumah ke rumah dan satu lagi yang menjadi konsep awal kami yakni Samsat Corner. Rencananya, akan dibuka di pusat perbelanjaan, semoga secepatnya bisa terlaksana," katanya

Menurut Ino, peningkatan layanan bertujuan agar masyarakat tertib dan sadar mengurus registrasi kendaraan bermotornya. "Setelah kenaikan biaya dan dit-

ingkatkan pelayanan, masyarakat yang ingin mengurus surat kendaraannya hanya memerlukan waktu lima menit. Jadi tidak perlu lagi memakai calo," katanya.

Dari Surabaya, situasinya seperti dikatakan AKP Sumarji, Kasubsie Samsat Surabaya 1 Manyar, kenaikan tarif PNBP ini sudah disosialisasikan Samsat Manyar mulai 1 Juni lalu sehingga masyarakat tidak kaget lagi.

[JT 02]



PIALA CITRA POLANTAS BENTUK SEBUAH APRESIASI

KINERJA kepolisian lalu lintas yang berjuang keras meningkatkan pelayanan dengan mengutamakan keselamatan berlalu lintas berbuah manis. Perjuangan itu, akhirnya mendapat apresiasi dari Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dalam bentuk penghargaan Pelayanan Prima Polantas 2010 yang diterimakan di acara Malam Penghargaan Citra Pelayanan Polantas 2010 di Hotel Bidakara, Jln Gatot Subroto Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (23/6).

SEBANYAK 19 polda berprestasi akhirnya terpilih, antara lain di lingkup Polda Metro Jaya, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Sulut, Sulteng,

Sumbar, Bengkulu, Kepri, Jambi, Kaltim, dan Banten. Mereka dipilih dari 43 unit pelayanan SIM, STNK, dan BPKB dari seluruh Polda di Indonesia melalui seleksi yang obyektif dengan melibatkan Direktorat Lalu

Lintas Babinkam Polri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Penghargaan tersebut mencakup 43 unit pelayanan SIM, STNK dan BPKB. Seleksi peraih

Seluruh unit pelayanan yang meraih penghargaan tersebut di antaranya adalah pelayanan Samsat Polres Jakarta Barat, Samsat Polres Kabupaten Tangerang, Satpas Polres Jakarta Selatan, Samsat Polda Kepri, Samsat Lubuk Pakam dan pelayanan BPKP Ditlintas Polda Sumut.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan,

Polda yang menerima penghargaan diminta tetap menjaga prestasinya. Sementara mereka yang belum mendapatkan penghargaan atas pelayanan primanya dapat melakukan terobosan agar memperoleh prestasi yang sama sesuai dengan reformasi yang dicanangkan Polri.

Terobosan yang dilakukan Samsat Jakarta Barat adalah dengan melakukan inovasi baru dengan Sistem Digital Arsip dan Barcoding System.

Arsip digital dan barcoding system diharapkan dapat mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Dengan sistem digital seluruh data wajib pajak dapat dicari dalam waktu singkat karena telah tercatat dalam komputer.

"Kami harapkan prestasi itu terus dipertahankan. Peningkatan pelayanan masyarakat jangan hanya retorika. Unit kerja di polda lainnya yang belum berprestasi harus segera melakukan terobosan dengan target mendapat penghargaan sama," ujar Kapolri, didampingi Dir Lantas Brigjen Pol Joko Susilo di sela-sela acara yang dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara AA Mangindaan, Gubernur Sumut Syamsul Arifin, Gubernur Sumsel Alex Nurdin, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Timur Pradopo, Kapolda Jabar Irjen Pol Sutarman, dan Kapolda Sumsel Hasyim.

Seluruh unit pelayanan yang meraih penghargaan tersebut di antaranya adalah pelayanan Samsat Polres Jakarta Barat, Samsat Polres Kabupaten Tangerang, Satpas Polres Jakarta Selatan, Samsat Polda Kepri, Samsat Lubuk Pakam dan pelayanan BPKP Dit Lantas Polda Sumut.

Terobosan yang dilakukan Samsat Jakarta Barat adalah dengan melakukan inovasi baru dengan Sistem Digital Arsip dan Barcoding System. Arsip digital dan barcoding system diharapkan dapat mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Dengan sistem digital seluruh data wajib pajak dapat dicari dalam waktu singkat karena telah tercatat dalam komputer.

[JT 02]





DIBALIK PENGHARGAAN PIALA CITRA POLANTAS

SEBANYAK 43 unit pelayanan SIM, STNK dan BPKB dari 19 polda (Polda Metro Jaya, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Sulut, Sulteng, Sumbar, Bengkulu, Kepri, Jambi, Kaltim, dan Banten) patut berbangga karena akhirnya kinerja mereka mendapat ganjaran berupa anugerah Penghargaan Citra Pelayanan Prima Polantas. Ide memberikan reward kepada para abdi masyarakat itu pasti tak muncul secara tiba-tiba, tapi tentu sudah melewati sejumlah pertimbangan dan alasan. Berikut adalah alasan yang melatarbelakanginya, hasil pemikiran Direktur Lalulintas Babinkam Polri Brigjen Pol Drs. Djoko Susilo, SH, M.Si.



SIM AVIS

LATAR BELAKANG

1. REFORMASI di tubuh Polri sudah dimulai sejak tahun 1999 yang ditandai dengan dirumuskannya cetak biru reformasi Polri (blue print) yang menyangkut aspek instrumental, struktural dan cultural, hal ini dilakukan dalam rangka menyikapi tuntutan masyarakat akan profesionalisme dan kemandirian Polri, sejalan dengan gerakan reformasi yang sedang berjalan saat itu.

2. Tindak lanjut dari reformasi Polri, telah ditetapkan Grand Strategi Polri dari tahun 2004 sampai dengan 2025, sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang

telah digariskan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya telah dibagi dalam tiga tahap yaitu : pada tahap I (2005 - 2009) adalah membangun kepercayaan (Trust Building), tahap II (2010-2015) adalah membangun kemitraan (partnership building) dan pada tahap III (2016-2025) adalah berorientasi pada kesempurnaan (strive for excellence).

3. Pada tahun terakhir tahap pertama, Kapolri telah menetapkan program percepatan dengan menetapkan

kan program Quick Wins Polri, yang bertujuan meningkatkan kepercayaan dan kecintaan publik terhadap Polri dalam waktu yang cepat, program unggulan Quick Wins tersebut adalah : Quick Respon Patroli Samapta, Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKB, Transparansi Penyidikan / SP2HP serta Transparansi Rekrutmen Personil Polri.

4. Dalam pelaksanaannya empat program tersebut dinilai berhasil dan

membawa perubahan yang berarti pada beberapa titik pelayanan Polri, khususnya fungsi lalu lintas. Perubahan pelayanan tersebut dapat terlihat dari meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bentuk-bentuk inovasi pelayanan polantas dalam bidang SIM, STNK dan BPKB, yang mengedepankan konsep pelayanan modern dengan ciri cepat, tepat, mudah, murah, akuntabel dan transparan.

5. Bukti nyata dari adanya perubahan pelayanan Polantas dapat terlihat pula dari meningkatnya jumlah pelayanan inovasi yang dibangun dan bentuk-bentuk penghargaan yang telah diterima oleh jajaran polisi lalu lintas, yaitu : Sertifikat ISO 9001 : 2000 sebanyak 7 unit dan ISO 9001 : 2008 sebanyak 28 unit, 118 unit SIM Keliling, 16 unit SIM Corner / Gerai, 40 unit Samsat Keliling, 25 unit Samsat Corner, 24 unit Samsat Drive Thru, 34 unit pelayanan mendapatkan Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI dan beberapa unit pelayanan mendapatkan Rekor Muri serta telah dilaksanakannya komputerisasi seluruh Pelayanan BPKB.

6. Keberhasilan program quick wins ditahun 2009 telah dilanjutkan di tahun 2010, dengan ditetapkan 22 Program Quick Wins Polri oleh Kapolri pada Rapim Polri Tahun 2010, untuk fungsi lalu lintas ditetapkan 8 (delapan) program Quick Wins yaitu :



- a. Transparansi pelayanan SSB (SIM, STNK, BPKB);
- b. Mewujudkan akses transparansi online;

- c. Mewujudkan Iptekpol online;
- d. Perangkat informasi teknologi kepolisian;
- e. Mewujudkan Hukum kepolisian on Line;
- f. Implementasi strategi polmas terhadap masyarakat;
- g. Ketanggapsegeraan (Quick Response);
- h. Penanganan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

7. Guna memberikan apresiasi kepada unit-unit pelayanan SSB yang telah melakukan inovasi pada lomba Citra Pelayanan Prima tahun 2010. Polri telah melakukan kerja sama dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan penilaian kepada 43 unit pelayanan yaitu SIM sebanyak 13 Satpas, STNK sebanyak 21 Samsat dan BPKB sebanyak 9 unit pelayanan, dengan hasil sangat memuaskan. Untuk memberikan motivasi, apresiasi sekaligus mendorong peningkatan pelayanan prima pada pelayanan SSB di masa yang akan datang, Ditlantas Babinkam Polri bekerja sama dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi akan menyelenggarakan kegiatan malam penganugerahan penghargaan Citra Pelayanan





SAMSAT Drive Thru

Prima Polantas Tahun 2010 kepada 43 unit pelayanan.

DASAR

1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman penilaian kinerja unit pelayanan public;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia;
7. Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

TUJUAN

Memberikan apresiasi dalam bentuk pemberian penghargaan Citra Pelayanan Prima Polantas tahun 2010 kepada 43 unit pelayanan SIM, STNK dan BPKB yang telah berupaya

dengan keras untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang terbukti dengan telah mendaftar sebagai peserta lomba Citra Pelayanan Prima tahun 2010 serta untuk mendorong dan sekaligus memotivasi unit-unit pelayanan publik lainnya agar dapat meniru dan mencontoh dalam rangka peningkatan pelayanan Polri secara keseluruhan.

HASIL YANG DIHARAPKAN

- Hasil yang ingin dicapai dalam penganugerahan penghargaan Citra Pelayanan Prima Polantas tahun 2010 ini adalah :
- a. Terwujudnya model-model pelayanan prima pada pelayanan SIM, STNK dan BPKB yang dapat dijadikan unit pelayanan percontohan bagi unit pelayanan public lainnya, khususnya di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - b. Timbulnya motivasi dan dorongan

yang kuat dari seluruh pimpinan dan staf unit pelayanan di seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk secara terus-menerus berlomba-lomba untuk melakukan perbaikan pelayanan dan pengembangan inovasi pelayanan yang tiada henti ;

- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang senantiasa berupaya keras untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian;
- d. Penelitian dan pemilihan terhadap 43 unit pelayanan public tersebut merupakan hasil kerjasama Ditlantas Babinkam Polri dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang di dukung oleh pihak pemerintah daerah setempat dan media massa setempat.

43 UNIT PELAYANAN PENERIMA PENGHARGAAN CITRA PRIMA POLANTAS TAHUN 2010

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|---|--|--|
| <p>Polda Sumatera Utara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Samsat Lubuk Pakam; 2. Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Sumut; 3. Pelayanan Samsat Medan Utara. | <p>Polda Sumatera Selatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Sumsel; 5. Pelayanan Satpas Poltabes Palembang. | <p>Polda Sumatera Barat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Sumbar. | <p>Polda Bengkulu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Bengkulu; 8. Pelayanan Samsat Bengkulu. | <p>e. Polda Kepri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Pelayanan Samsat Polda Kepri. | <p>Polda Jambi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Jambi; 11. Pelayanan Samsat Jambi. | <p>Polda Kalimantan Selatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Banjarmasin; 13. Pelayanan Samsat Banjarmasin. | <p>Polda Kalimantan Timur :</p> | <p>14. Pelayanan Samsat Balikpapan Papan Polda Kalimantan Timur;</p> <p>15. Unit BPKB Ditlantas Polda Kaltim;</p> <p>16. Samsat Poltabes Samarinda;</p> <p>17. Satpas Polres Tarakan.</p> | <p>Polda Banten :</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. Pelayanan Samsat Polda Serang. | <p>Polda Jawa Barat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. Pelayanan Samsat Bandung Tengah; 20. Pelayanan Satpas Polres Cimahi; 21. Pelayanan Satpas Polres Cirebon; 22. Pelayanan Samsat Polres Karwang; 23. Pelayanan Satpas Polresta Tasikmalaya; 24. Pelayanan Satpas Polwiltabes Bandung; 25. Pelayanan Satpas Polres Bandung. | <p>Polda Jawa Timur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 30. Pelayanan Satpas Polwiltabes Surabaya; 31. Pelayanan Satpas Polres Jember; 32. Samsat Polres Kediri; 33. Samsat Polres Madiun. | <p>Polda DIY :</p> <ol style="list-style-type: none"> 34. Pelayanan Samsat Bantul; 35. Pelayanan Samsat Gunung Kidul. | <p>Polda Bali :</p> <ol style="list-style-type: none"> 36. Pelayanan Samsat Tabanan; 37. Pelayanan Satpas Tabanan. | <p>Polda NTB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 38. Pelayanan Satpas Polres Lombok Timur. | <p>Polda Sulawesi Utara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 39. Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Sulut. | <p>Polda Sulawesi Selatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 40. Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Sulsel ; 41. Pelayanan Satpas Polwiltabes Makassar; 42. Pelayanan Samsat Makasar. | <p>Polda Sulawesi Tengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 43. Pelayanan Samsat Polda Palu |
|--|--|---|--|--|---|--|---------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|---|--|--|

DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA METRO JAYA BESERTA JAJARAN DAN BHAYANGKARI

Mengucapkan

Selamat & Sukses

Atas dilantikannya

IRJEN POL DRS. WAHYONO SEBAGAI KABINTELKAM POLRI

IRJEN POL DRS. TIMUR PRADOPO SEBAGAI KAPOLDA METRO JAYA

BRIGJEN POL DRS. R. DADANG GARHADI KARNASAPUTRA SEBAGAI KAPOLDA JAMBI

BRIGJEN POL DRS. SUEDI HUSEIN, SH SEBAGAI KAPOLDA RIAU

BRIGJEN POL DRS. SYAFEI AKSAL SEBAGAI KAKORBRIMOB POLRI

Selamat mengemban tugas baru

DIREKTUR LALU LINTAS POLDA METRO JAYA

KOMBES POL DRS. CONDRU KIRONO, SH, MM

Konferensi Aseanapol

APRESIASI INTERNASIONAL

► Sukses Tangani Masalah Terorisme

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, akhir Mei lalu terbang ke PhnomPenh, Kamboja memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi ke -30 Aseanapol.

KONFERENSI yang berlangsung dari 24-28 Mei 2010 itu dihadiri beberapa kepala Negara dan sepuluh kepala kepolisian serta beberapa kepala kepolisian negara sahabat/ mitra dialog dari Australia, China, Jepang, Korea dan New Zeland serta dihadiri pula oleh perwakilan dari Sekretariat Asean dan Setjen ICPO-Interpol.

Sekjen NCB-Interpol Polri Brigjen Halba Rubis, yang ikut dalam pertemuan tersebut kepada Jagratara mengatakan Indonesia termasuk negara yang menjadi 'bintang' dalam pertemuan tersebut.

Keberhasilan Polri menangani teroris mendapat pengakuan dari dunia. Karena terorisme adalah kejahatan lintas Negara, pelakunya dari berbagai negara dan tindak pidananya direncanakan di suatu negara dan dilaksanakan di negara lain

"Kapolri juga menyampaikan mengenai modus operandi baru teroris dan beberapa Kepala Kepolisian Asean tertarik terhadap hal ini," kata Halba Rubis.

Kapolri juga menyampaikan mengenai rencana pembangunan pusat pelatihan pasukan perdamaian di Indonesia. Perwakilan UN datang dan meninjau bagaimana persiapan Indonesia untuk mengirim pasukannya untuk dikirim ke Darfur. "Jadi pusat pelatihan ini nanti tidak hanya melatih polisi Indonesia, tapi dari semua negara. Inilah yang

menarik perhatian," terang Halba Rubis.

Terlepas dari hal itu, ujar Halba Rubis, segala bentuk pertemuan Internasional yang berkaitan dengan kerjasama kepolisian antar negara-negara di dunia ini pelaksanaannya adalah sistematis.

Makanya di sini ada yang namanya Kepala Bidang Konvensi Internasional, yang menyiapkan materi yang akan dibawa dalam konferensi. "Dalam konferensi kemarin setelah opening ceremony ada pertemuan antar kepala kepolisian yang membahas berbagai hal penting. Kemudian masing-masing Kepala Polisi ini bisa menyampaikan hal penting apa yang menarik untuk dibicarakan. Kapolri menyampaikan tentang upaya Polri memberantas terorisme dan modus baru teroris yang mendapat apresiasi begitu besar," jelas Rubis.

Menurut Halba Rubis, Indonesia adalah Negara yang ikut menandatangani konvensi PBB tahun 2000 tentang Trans National Organize Crime. "Indonesia sudah termasuk yang menandatangani dan kita sudah meratifikasi itu dengan UU RI No 5 Tahun 2009. Tidak hanya menangani masalah kerja sama dan penanganan Trans National Crime, tetapi juga dalam rangka kerjasama dalam peningkatan SDM kepolisian dalam negara Asean, dan juga peningkatan sarana dan prasarana. Kita juga mengundang negara-negara Dialogue Partner (Australia, Jepang, Korea Selatan, New Zealand, dan China)," tambah Halba Rubis.

Negara-negara itulah yang memberikan support ke negara-negara Asean.. Banyak hal yang telah mereka berikan, dan sekarang berkembang tidak hanya terbatas negara-negara tersebut tapi juga negara-negara Eropa Timur, Belanda, Amerika dan Inggris.

Halba Rubis mengatakan sekarang kita tidak hanya melatih polisi-polisi Indonesia, kita juga mengundang polisi-



BUAT POLRI

polisi di Asia Pacific, dan jumlah siswanya sendiri sudah mencapai kurang lebih 6400.

TINGKATKAN PROFESIONALISME

Konferensi yang dibuka oleh Wakil PM/ Kementerian Dalam Negeri Kamboja Sar Kheng, dihadiri 10 Kepolisian itu bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Kepolisian, memperkuat kerjasama Kepolisian dalam pemberantasan kejahatan lintas negara dan mempromosikan keberlangsungan hubungan persahabatan di antara anggota Kepolisian negara-negara Asean.

Konferensi membahas beberapa isu penting yang saling menguntungkan, antara lain perdagangan obat-obatan ilegal, terorisme, penyelundupan senjata api, dagangan orang, kejahatan di laut, kejahatan perbankan dan penyalahgunaan kartu kredit, kejahatan dunia maya, pemalsuan dokumen, penipuan lintas Negara, perkembangan dari e-ADS (electronic Aseanapol Database system), dan bantuan berupa bantuan hukum timbal balik dan pertukaran personel.

Beberapa hasil penting yang disepakati, pertama Joint Communique, disepakati sebagai berikut konferensi sepakat bahwa negara anggota yang bertindak selaku tuan rumah konferensi Aseanapol akan mewakili Aseanapol untuk hadir atau berpartisipasi dalam forum internasional dengan persetujuan pemerintah negaranya.

Konferensi secara bersama-sama menyepakati bahwa pertemuan tahunan terbukti menjadi mekanisme penting dan efektif untuk mempromosikan kerjasama kawasan diantara Kepolisian negara Asean.

Kedua, ada 4 (empat) Plan of Action yang telah disepakati Strengthening Aseanapol mechanism for closer, deeper and more effective cooperation among Asean Police.

Topik Ini merupakan proposal dari Kepolisian Kamboja yang dibahas pada forum para Ketua delegasi dan ditindak lanjut pada working group 1, dan menghasilkan beberapa rencana kegiatan, antara lain Sekretariat Aseanapol bertugas untuk menjajaki berbagai kemungkinan dan membuat usulan-usulan untuk memperkuat mekanisme Aseanapol untuk kerjasama yang lebih dekat, mendalam dan efektif;

Negara anggota Aseanapol melanjutkan untuk memanfaatkan keberadaan focal point Aseanapol di masing-masing negara untuk bekerjasama erat dengan Sekretariat Aseanapol guna menindaklanjuti resolusi yang telah diajukan pada Konferensi Aseanapol dalam rangka memperkuat kerjasama diantara negara anggota.

Policing Cooperation between ASEANAPOL and Ministry of Public Security (MPS) of People's Republic of China. Kerjasama Kepolisian yang dimaksud pada topik diatas, antara lain: membentuk dan memperkuat saluran penghubung dan kerjasama penyidikan antara Aseanapol dengan mitra dialog.

Memorandum of Agreement and Memorandum of



Understanding and Rules of Procedure In the Transnational Coordination, Territorial Jurisdiction, Hot Pursuit Operations and Law Enforcement Action Among member countries in Relation to Measures against Terrorism, Arms Smuggling, Human Trafficking, and Illicit Drug Trafficking.

Topik ini merupakan proposal Kepolisian Philippines yang dibahas pada forum para ketua delegasi dengan negara mitra dialog dan ditindak lanjut pada working group 2, dengan menyusun rencana kegiatan Kepolisian Philippines mengkaji keberadaan seluruh MOAs/ MOUs antara Philippines dengan negara anggota lainnya mencakup kesepakatan bilateral dengan negara anggota Aseanapol dan mengidentifikasi jalan keluar didalam MOAs dan MOUs yang menghalangi koordinasi, operasi dan tindakan penegakan hukum melawan kejahatan lintas negara seperti terroris, penyelundupan senjata api, perdagangan orang dan penyelundupan obat-obatan terlarang.

"Command, Control and Coordination Training (and negotiator training) for Critical Incidents for Aseanapol member countries

Topik ini merupakan proposal Kepolisian Australia yang dibahas pada forum para ketua delegasi dengan negara mitra dialog dan ditindak lanjut pada working group 2 dengan menyusun rencana kegiatan.

Selain kegiatan konferensi dimaksud, dilaksanakan pula kegiatan tambahan berupa Aseanapol Golf Tournament dan pada kesempatan itu, delegasi Polri berhasil menjadi Juara I untuk nomor beregu, posisi 2 dan 3 dipegang oleh delegasi Kamboja dan Thailand. Untuk nomor perorangan perwakilan dari Kepolisian Kamboja selaku tuan rumah berhasil duduk pada posisi I, untuk posisi 2 dan 3 dipegang oleh perwakilan dari Polri. jto2



Tradisi Baru Jenderal Timur

Irjen Pol Timur Pradopo resmi dilantik jadi Kapolda Metro Jaya, Selasa (22/6). Mantan Kapolda Jawa Barat tersebut mengantikan Inspektur Jenderal Wahyono yang diangkat menjadi Kepala bagian Intelijen dan Keamanan Mabes Polri.

PELANTIKAN tersebut menjadi kado yang sangat mengesankan buat Irjen Timur Pradopo. Mengapa? Karena jabatan strategis itu dipercayakan kepadanya saat Polri menjelang genap berusia ke-64. Artinya, Irjen Timur mendapat hadiah sangat istimewa sepanjang titian karirnya di kepolisian.

Pelantikan dilakukan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia

pukul 9 pagi. Seusai dilantik, upacara pisah sambut juga diadakan di Polda Metro Jaya pukul 13.00 WIB dan dihadiri seluruh kepala kepolisian resor dan kepala kepolisian sektor di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Ada satu tradisi yang sebelumnya belum dilakukan saat pisah sambut. Usai pemberian ucapan selamat di gedung Pertemuan Bhayangkara, Kapolda menyusuri jalan yang kirikanannya berjejer ribuan anggota





seperti layaknya lorong hidup mulai dari gedung pertemuan hingga kantor Kapolda di gedung utama.

Aura Irjen Timur Pradopo begitu terpancar ketika kendaraannya perlahan melintasi jalan. Dia tersenyum dan begitu percaya diri dalam menatap masa depan Jakarta. Seperti diungkapkannya usai serah terima, yang mengajak warga untuk menjaga keamanan Jakarta.

"Saya selaku Kapolda mengharapkan dukungan dalam mengemban amanat, sehingga program-program yang dijalankan dapat segera terwujud, saya juga ucapkan terimakasih kepada Wahyono karena telah memimpin Polda Metro Jaya, mohon doanya," kata Timur.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengakui adanya kompleksitas kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. "Jakarta punya ciri khas yang berbeda dengan daerah lain, sudah barang tentu punya kompleksitas yang berbeda," paparnya.

Sebelumnya, Wahyono menyebutkan Jakarta memiliki karakteristik yang khas dan implikasi yang kompleks serta relatif tinggi dibanding daerah-daerah lain. "Kekhasan itu selain sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan nasional, jadi semua aktivitas terpusat disini," sebut Wahyono.

Wahyono yang kini menjabat sebagai Kabaintelkam Mabes Polri ini menuturkan dikarenakan Jakarta sebagai pusat perhatian maka Polda dituntut meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

"Selama satu tahun delapan bulan saya emban tugas situasi kamtibmas relatif kondusif, ini karena peran serta seluruh jajaran Polda, Polres, Polsek, pemerintah dan masyarakat. Atas nama pimpinan polda saya sampaikan terimakasih atas segala dedikasi ketika saya menjabat sebagai Kapolda," ujarnya.

Selain itu dia juga berjanji mengedepankan transparansi dalam penyelesaian kasus di wilayah hukumnya. "Kami harapkan adanya transparansi," ujarnya.

Timur juga bertekad menindak tegas semua anggotanya yang melanggar hukum serta etika profesi kepolisian. "Langkah hukum akan ditegakkan, yang tidak disiplin dikenai pidana, yang bagus kami beri penghargaan," tuturnya. jt02

TRAFFIC INTELLIGENCE PERLUKAH?

(menyongsong tahun “kemacetan total” 2014)

OLEH BRIGJEN POL (PURN) SUHARYONO

KALAU kita bicara tentang intelijen, pikiran kita lantas terarah pada trilogi intelijen: Penyelidikan, Pengamanan dan Pengalangan (disingkat: Lidik – Pam – Gal). Namun kali ini kami ingin mengajak para pembaca untuk menelaah intelijen dalam arti sempit yakni: Penyelidikan, tetapi bukan sebagaimana tercantum di dalam KUHAP. Penyelidikan (disingkat Lidik) dalam artikel ini adalah kegiatan Observasi yang semestinya dilakukan oleh setiap Polisi yang bertugas di lapangan seperti: Polantas, Sabhara, dan lain – lainnya. Diakuai atau tidak sebenarnya setiap Polisi yang berada di jalan (lapangan) melekat kepadanya fungsi intelijen. Setiap Polisi di jalanan sebetulnya adalah Intelligence Agent. Dia melihat segala sesuatu yang berada di sekelilingnya, akan tetapi belum tentu dia memperhatikan dengan seksama (observant) serta mencatat hal-hal penting yang dia lihat, apalagi mencatatnya, mengumpulkannya, menganalisisnya dan untuk kemudian

melaporkannya kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan untuk diproses dan didaya-gunakan.

TAHUN 2014 JAKARTA MACET TOTAL?

Itulah prediksi para pakar dan pengamat lalu-lintas. Kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat diperkirakan miliaran rupiah setiap tahunnya. Apa benar di tahun itu akan terjadi bukan saja traffic delay tetapi juga traffic jam/congestion yang luar biasa? Apakah dengan demikian maka Polri cq Polantas sebagai penanggung jawab utama keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas membiarkan kejadian itu sebagai suatu hal yang take it for granted untuk kemudian berpangku tangan saja? Kami kira tidak! Polri pasti akan bertindak proaktif dengan melakukan langkah-langkah konkrit guna menjawab tantangan tersebut. Tindakan proaktif inilah yang menjadi dasar pemikiran menengahkan intelijen lalulintas. Alasan klasik bahwa jumlah personel tidak cukup, penambahan jumlah

kendaraan bermotor tidak seimbang dengan penambahan panjang jalan, sarana transportasi yang tidak memadai dan alasan-alasan lain, tidak bisa dijadikan “pembenaran” bahwa Jakarta “harus” macet total di tahun 2014 yang akan datang. Pertanyaannya adalah: seberapa efisien pengerahan dan pemanfaatan personel Polri yang ditugasi mengatur lalu-lintas sejauh ini? Seberapa efisienkah jalur jalan yang ada digunakan untuk menampung arus lalu-lintas kendaraan selama ini? Seberapa jauh personel Polri yang diterjunkan di lapangan memahami karakteristik jalan yang harus dikendalikannya?

KEEP THEM MOVING.

Inilah motto global yang dianut oleh hampir seluruh pemangku tanggung jawab kelancaran arus lalu-lintas di jalan umum. “Usahakan lalu-lintas tetap berjalan/bergerak” (keep them moving) memang paralel dengan artian lalu-lintas itu sendiri yakni: “pergerakan orang atau barang dengan

menggunakan alat angkutan atau tidak dari satu tempat ke tempat lain dalam satuan waktu di atas sarana jalan". Nah, agar tetap bergerak maka semua hambatan yang ada di atas sarana jalan harus dihilangkan atau paling tidak diminimalisir. Hambatan tersebut bisa bermacam-macam, dari yang paling sederhana sampai dengan yang kompleks. Dari manusia pemakai jalan, sarana dan prasarana jalan, bahkan bisa ditimbulkan pula oleh tingkah laku petugas lalu-lintas itu sendiri yang tidak terampil mengendalikan "the flow of traffic". Hambatan yang bermacam-macam dan variatif inilah yang harus terus diobservasi, dicermati, dicatat, dikumpulkan, dianalisis dan dijabarkan kedalam tindakan di lapangan yang terarah dan terukur. Disinilah Intelijen Lalu Lintas menampilkan peranannya: observasi, deteksi, kumpulkan fakta/data, analisis, tetapkan cara bertindak (CB-CB) dan evaluasi untuk umpan balik, demikian seterusnya..

TRAFFIC INTELIJEN BERBASIS OBSERVASI DAN DETEKSI.

Kegiatan observasi dan deteksi pada hakekatnya dilakukan oleh setiap personel Polisi yang bergerak di lapangan dalam kiprahnya sehari-hari, apakah dia sedang berpatroli, sedang melakukan penjagaan dan pengaturan lalu-lintas di titik-titik tertentu (point control) dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa dipetik dari hasil observasi dan deteksi mereka manakala kegiatan mereka di lapangan ini dikumpulkan, dipilah-pilah dan dianalisis dengan seksama. Personel Polisi yang bergerak di lapangan inilah sesungguhnya yang bertindak selaku Intelligence Agents di bidang lalu lintas. Ia melakukan observasi dan mencermati apa saja yang timbul dan terjadi di lapangan. Memang penanggung jawab utama kelancaran lalu-lintas adalah Polantas, namun dengan minimnya jumlah personel Polantas dibandingkan dengan cakupan wilayah tanggung jawab yang begitu luas, maka tidaklah mungkin dibebankan sepenuhnya kepada Polantas. Memang benar penjurunya adalah Polantas, namun dukungan penuh dari petugas Polisi non-Polantas seperti petugas Samapta yang nota bene sama-sama bergerak di lapangan adalah merupakan suatu keharusan, bahkan sudah menjadi suatu kewajiban untuk mendukung fungsi lalu-lintas. Dukungan penuh oleh unit-unit lain di luar unit Polantas merupakan condition sine qua non. Hasil observasi dikumpulkan, dianalisis, dilakukan check – recheck – cross check, untuk kemudian disajikan ke dalam bentuk cara bertindak – cara bertindak (CB – CB) yang acceptable

dan applicable di lapangan.

Siapa yang melakukan observasi? Dilakukan oleh personel Polri yang bergerak di lapangan, utamanya Polantas dan Samapta. Penjurunya tetap Polantas, yang akan mengatur dan mengkoordinasikan Unit-unit Lalu-lintas dan Unit-unit Samapta dengan melibatkan personel Polda, Polres dan Polsek. Secara teknis Polantas akan mendesain suatu model observasi/deteksi yang mudah untuk "dicerna" oleh level Perwira sampai dengan Bintara. Seluruh hasil observasi dan deteksi dalam periode waktu tertentu dikumpulkan serta dianalisis oleh kelompok kerja tertentu untuk disajikan di dalam suatu CB-CB yang tepat guna dan tepat sasaran.

APA SAJA YANG DIBIDIK MENJADI OBJEK OBSERVASI DAN DETEKSI?

Bidikan diarahkan kepada semua hambatan yang besar maupun kecil yang secara potensial menimbulkan kemacetan lalu-lintas.

Cukup banyak yang harus dibidik sebagai objek observasi dan deteksi. Sasaran utama bidikan adalah: hambatan taktis dan hambatan teknis. Keduanya bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain (saling kait mengkait, interwoven).

HAMBATAN TAKTIS.

Hambatan taktis antara lain misalnya: pemahaman tentang jam-jam puncak (peak hours) dan jam-jam sibuk (rush hours). Pemahaman tentang pembagian wilayah pengaturan lalu-lintas, penggal jalan mana merupakan tanggung jawab personel Polda, mana yang menjadi tanggung jawab Polres dan Polsek dan seterusnya. Pemahaman tentang cara pengaturan lalu-lintas di jalan umum yang secara seragam harus dikuasai oleh setiap petugas Polisi (ulangi, petugas Polisi, bukan petugas Polantas). Pemahaman tentang siapa yang menjadi penanggung jawab pengaturan lalu-lintas.

Hambatan taktis cukup banyak variabelnya yang tidak mungkin diungkapkan disini secara rinci.

- Pemahaman tentang pembagian wilayah untuk pengaturan lalu-lintas. Daerah mana yang menjadi tanggung jawab pengaturan lalu-lintas oleh personel Polda, Polres dan Polsek harus ditetapkan secara jelas walaupun harus tetap bersifat fleksibel.
- Pemahaman tentang jam puncak (peak hours) dan jam sibuk/padat (rush hours). Banyak salah tafsir tentang jam puncak dan jam sibuk ini. Pemahaman yang benar tentang

jam puncak adalah: kepadatan arus lalu-lintas yang mencapai puncaknya di pagi hari oleh karena pergerakan yang sama antara anak sekolah dan pegawai menuju ke sekolah dan tempat kerja masing-masing dan di sore hari dimana terdapat pergerakan pengguna jalan yang bersamaan untuk menuju ke rumah masing-masing. Di Jakarta jam puncak pagi hari biasanya dimulai jam 6:30 s/d jam 10 pagi, sedangkan jam puncak sore hari dimulai jam 16:30 s/d 19:00.

Sedangkan makna jam-jam sibuk (rush hours) adalah kepadatan arus lalu-lintas pada waktu-waktu tertentu dan pada penggal-penggal jalan tertentu yang disebabkan oleh karena: bubarannya sekolah, kegiatan di pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat ibadah, pasar tumpah, tempat-tempat rekreasi/hiburan dan sebagainya. Rush hours walaupun sifatnya sporadis namun kemunculannya mampu menimbulkan efek domino yakni kemacetan terhadap jalur jalan yang lain. Berbekal pemahaman tentang jam puncak dan jam sibuk inilah maka penugasan personel di jalan dapat dilakukan pada jam-jam tertentu saja dan pada titik-titik tertentu secara selektif.

- Pemahaman tentang taktik dan teknik pengaturan lalu-lintas. Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak personel Polisi (Polantas dan Samapta) yang berada di jalan tidak trampil mengatur arus lalu-lintas, tactically and technically. Isyarat tangan yang keliru, posisi berdiri petugas di suatu persimpangan yang keliru, pengendalian arus lalu-lintas di persimpangan yang keliru, petugas tidak lagi menghiraukan pelanggaran garis berhenti/stop. Ketidaksihinggaan mengatur lalu-lintas ini menambah kesemrawutan lalu-lintas di banyak persimpangan jalan.
- Pemahaman tentang jumlah personel yang dikerahkan (deployment of personnel) "Pemborosan personel". fakta menunjukkan bahwa di suatu persimpangan jalan yang seharusnya cukup ditugasi satu atau maksimal 2 orang petugas, ternyata ditempatkan 3 orang petugas, bahkan kadang-kadang lebih. Hal ini menampilkan bahwa deployment (penugasan) personel tidak diperhitungkan secara matang efisiensi dan efektifitasnya berdasarkan tempat dan waktu.
- Pemahaman tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pengaturan lalu-lintas.

Semua personel Polisi berseragam dinas yang bergerak di jalan adalah penanggung jawab pengendalian lalu-lintas, dalam hal ini Polantas dan Samapta. Penjurunya memang Polantas, Samapta memback-up. Pengkotak-kotakan tugas dan tanggung jawab secara kaku harus segera diminimalisir secara bertahap dengan dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa masyarakat luas memperoleh manfaat manakala lalu-lintas berjalan dengan tertib dan lancar. Mereka tidak terlalu peduli siapa yang mengatur lalu-lintas. Bagi mereka Polasilah yang bertanggung jawab, whatsoever!

- Pemahaman tentang penegakan hukum lalu-lintas. Cukup banyak peraturan lalu-lintas yang tidak ditegakkan (di-enforce) secara konsekuen. Cukup banyak personel Polisi yang kurang peduli dengan pelanggaran-pelanggaran lalu-lintas yang lewat di depannya, misalnya: motoris yang melawan arah, motoris yang menggunakan trotoar, gerobak melawan arah, pengendara kendaraan yang seenaknya melampaui garis berhenti (stop line) di persimpangan jalan dan sebagainya. Pelanggaran lalu-lintas, betapapun kecilnya harus ditindak, apalagi yang secara potensial menyebabkan hambatan/gangguan terhadap arus lalu-lintas. Pada hakekatnya, kemacetan lalu-lintas diawali dengan pelanggaran lalu-lintas. Operasi khusus lalu-lintas yang biasanya disebut dengan "Operasi Patuh" pada kenyataan di lapangan outcome-nya tidak efektif bahkan tidak menimbulkan efek jera sebagaimana diharapkan. Sebaiknya operasi rutin dengan peningkatan aktifitas tindakan hukum day-to-day lebih berdampak positif berupa kepatuhan terhadap peraturan lalu-lintas dari para pemakai jalan.

HAMBATAN TEKNIS.

- Pemahaman tentang Traffic Engineering (Rekayasa Lalu Lintas) Traffic Engineering (TE) dipilah menjadi 2 kategori yakni: General TE dan Police TE. General TE berorientasi pada desain jalan, geometric jalan, simpang datar jalan, simpang susun jalan, jembatan dan sebagainya pokoknya yang bersifat pembangunan fisik jalan. Penanggung jawab General TE ada pada pihak PU, Dishub dan sebagainya. Sedangkan Police TE berorientasi pada menemukan/mendeteksi kenapa di ruas jalan tertentu acapkali terjadi kecelakaan atau kenapa di ruas jalan atau

persimpangan tertentu selalu terjadi kemacetan? Apakah desain jalannya yang kurang baik, apakah penerangan lampunya tidak cukup, apakah rambu lalu-lintasnya sudah cukup, apakah marka-marka jalannya (traffic lanes, marks, stop line) sudah memadai? Apakah traffic light di persimpangan-persimpangan jalan telah berfungsi dengan baik? Penanggung jawab Police TE adalah pihak Polri, dalam hal ini Ditlantas atau Satlantas setempat. General Traffic Engineering dan Police Traffic Engineering adalah dua sisi mata uang yang sama, yang satu mendukung yang lain, saling isi mengisi, bersifat sinergik.

- Pemahaman tentang karakteristik jalan. Melakukan observasi dan deteksi terhadap jam-jam puncak, jam-jam sibuk serta kecenderungan lainnya, maka dapat diprediksi karakteristik jalan ditinjau dari aspek arus lalu-lintasnya: di titik-titik dan di simpul-simpul mana timbul kemacetannya, kearah mana kemacetannya, dan sebagainya. Perlu difahami bahwa hambatan di satu persimpangan jalan akan berpengaruh terhadap persimpangan yang lain, terlebih lagi kalau jarak antara persimpangan relatif dekat! Personel Polda, Polres dan Polsek harus mampu "membaca" karakteristik jalan di wilayah masing-masing untuk menetapkan langkah-langkah antisipasi selanjutnya di wilayah hukum masing-masing.
- Pemahaman tentang Transportasi Umum (public transportation). Sarana dan prasarana transportasi umum atau yang sekarang dikenal dengan istilah "mass rapid transportation" ternyata dari dulu sampai sekarang tidak mampu mengurangi "beban" lalu-lintas di jalan umum. Bus kota, Kopaja, Metro Mini, Angkot, ojek, semua saling berebut di jalan umum. Busway yang diharapkan dapat mengatasi masalah transportasi umum ternyata gagal memenuhi sasaran utama: angkutan massal yang aman, nyaman, tepat waktu dan beaya terjangkau. Rencana pembangunan monorail dan kereta api bawah tanah gagal direalisasikan. Masyarakat lebih memilih naik sepeda motor dan kendaraan pribadi oleh karena iming-imingan kemudahan pembelian secara kredit.

KESIMPULAN.

Intelijen Lalu-lintas yang berbasis

pada observasi dan deteksi terhadap hambatan/gangguan yang secara potensial menimbulkan kemacetan lalu-lintas ditunjukkan untuk menajamkan cara-cara bertindak (CB-CB) yang efektif dan efisien oleh segenap personel Polisi yang diturunkan ke jalan, mengingat terbatasnya jumlah personel yang tersedia dari waktu ke waktu. Output yang dicapai oleh Intelijen Lalu-lintas dapat digunakan untuk bahan koordinasi lintas instansi di luar Polri seperti Dephub, PU dan sebagainya.

Operasi khusus lalu-lintas sebaiknya lebih diarahkan menjadi operasi selektif harian (selective traffic law enforcement) yang melibatkan seluruh personel Polisi yang bertugas di lapangan (Polantas dan non-Polantas) dengan bekal blanko Tilang yang mencukupi.

Intelijen Lalu-lintas harus dilakukan secara terarah dan terpadu, diselenggarakan oleh Polantas selaku penjurunya, didukung oleh personel Polisi yang bergerak di lapangan seperti Samapta dan sebagainya. Intelijen Lalu-lintas tidak akan berhasil secara optimal manakala tidak ada sinergi antara Polantas dan unit-unit Polisi lainnya yang sama-sama bertugas di lapangan. Peranan Intelijen Kepolisian (dalam hal ini Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda) akan turut menentukan keberhasilan Intelijen lalu-lintas dalam mencapai sasaran yang hendak dicapai.

Ketidak seimbangan antara personel yang bertugas di jalan dengan penambahan panjang jalan dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor sebaiknya tidak lagi dijadikan alasan untuk suatu pembenaran bahwa arus lalu-lintas di kota Jakarta pada tahun 2014 dibiarkan macet total (totally jammed) sebagaimana diprediksi oleh pakar-pakar lalu-lintas.

Pelanggaran lalu-lintas betapapun kecilnya harus ditindak. Ada adagium yang berbunyi: "pelanggaran-pelanggaran kecil manakala tidak segera ditertibkan, lama kelamaan akan timbul pelanggaran yang kompetitif dan pada gilirannya pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dianggap sebagai sesuatu yang bukan lagi melanggar hukum".

Apakah ada unsur kesengajaan untuk menghambat ter-realisasinya transportasi umum yang aman, nyaman, tepat waktu, sehingga masyarakat dirangsang untuk berbondong-bondong membeli kendaraan bermotor secara kredit, yang akan menguntungkan produser kendaraan bermotor? Intelijen Lalu-lintaslah yang bisa menjawabnya.

Suharyono Sukardi

KABID TELEMATIKA POLDA NANGGROE ACEH DARUSSALAM BESERTA SELURUH JAJARAN DAN BHAYANGKARI

MENGUCAPKAN :



1 JULI 2010

Dirgahayu POLRI KE-64

**MEMBANGUN KARAKTER MELALUI KEPEMIMPINAN YANG
UNGGUL, KEMITRAAN, PROFESIONALISME DAN ETIKA PRIMA**



KABID TELEMATIKA POLDA NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KOMBES POL DRS. FAISAL ABDUL NASER

